

PERSPEKTIF GESI DALAM PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CPNS DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Juliana Emma Ulina

Widyaiswara BPSDM Provinsi Kalimantan Barat

ABSTRACT

Consistent and systematic concern and care given by the organizers of CPNS basic training to the participants who are pregnant, breastfeeding, sick/having disease is the implementation of GESI responsive training. This research aims to illustrate and provide recommendations for the implementation of GESI responsive CPNS basic training in West Kalimantan Province. The sample of this research were 9 (nine) Regional Government Agencies which organized CPNS Basic Training in Province, Regencies and cities. The research method uses qualitative descriptive methods, and data collection using questionnaires with the Google Form application. The results showed that the facilities for the participants of CPNS basic training in West Kalimantan Province with certain conditions have not been available yet. It means the training is unresponsive GESI. One of the cause of the problem is due to the limited information about GESI owned by the organizers so that when they are planning the training, access gaps, participation, controls and benefits for participants with certain conditions are less considered

Keywords: Gender Mainstreaming (PUG), Gender Responsive Planning and Budgeting (PPRG)

ABSTRAK

Perhatian dan kepedulian yang konsisten dan sistematis yang diberikan oleh penyelenggara Pelatihan Dasar CPNS kepada peserta dengan kondisi tertentu (sedang hamil, sedang menyusui, sakit/memiliki riwayat penyakit kronis) merupakan bentuk penyelenggaraan pelatihan yang responsif GESI. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memberikan saran penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS di Provinsi Kalimantan Barat yang responsif GESI. Adapun sampel penelitian ini adalah 9 (Sembilan) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelatihan dasar CPNS di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan pengumpulan data menggunakan angket (kuesioner) dengan aplikasi *Google Form*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS di Provinsi Kalimantan Barat bagi peserta dengan kondisi tertentu belum responsif GESI, karena belum tersedianya sarana prasarana tersebut. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena terbatasnya informasi tentang GESI yang dimiliki oleh penyelenggara sehingga pada saat menyusun perencanaan penyelenggaraan pelatihan kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi peserta dengan kondisi tertentu kurang dipertimbangkan.

Kata Kunci: Pengarusutamaan Gender (PUG), Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

Korespondensi penulis: Juliana Emma Ulina, E-mail: emajuliana44@gmail.com No. Telp/HP: 081345191262

1. PENDAHULUAN

Berbicara tentang gender, berbicara tentang perbedaan laki-laki dan perempuan tetapi bukan pada perbedaan kodrati yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa melainkan pada perbedaan tanggung jawab, tugas, potensi dan kondisi antara laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh masyarakat dipengaruhi dengan adat istiadat dan budaya masyarakat itu sendiri (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016). Sedangkan *Gender Equality and Social Inclusion* (GESI) atau Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial adalah sebuah gagasan yang berupaya untuk memperkecil perbedaan oleh karena jenis kelamin, umur, status sosial serta kondisi ketidakberdayaan seperti kepaan atau cacat tubuh dan fokus pada pemberian kesempatan yang sama untuk ikut serta dan menerima hasil pembangunan (Susanti, 2020).

Pengarusutamaan gender/GESI merupakan upaya untuk mensinergikan gender dan inklusi sosial menjadi satu kesatuan yang dilakukan secara sistematis mulai dari merencanakan, menggunakan/melaksanakan, mengawasi dan menilai setiap kebijakan dengan menggunakan instrumen yang disebut Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Lembaga Administrasi Negara, 2015).

Dalam menyelenggarakan sebuah pelatihan, sangatlah penting bagi penyelenggara untuk memperhatikan adanya kesetaraan GESI bagi pesertanya. Setiap peserta dengan kondisi dan latar belakangnya yang berbeda-beda memiliki hak yang sama dalam menerima kesempatan, keikutsertaan/keterlibatan, pengawasan dan manfaat serta rasa aman dan nyaman pada saat mengikuti pelatihan.

Pelatihan Dasar CPNS merupakan salah satu pelatihan yang wajib diikuti oleh setiap CPNS sebelum diangkat menjadi PNS. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III, dimana sebelum status CPNS berubah menjadi PNS maka wajib menjalani masa percobaan selama satu tahun dan mengikuti pendidikan dan pelatihan CPNS. CPNS harus mengikuti diklat tanpa bisa memilih waktu penyelenggaraan yang sesuai dengan kesiapan kondisinya. Pada saat peserta dipanggil untuk mengikuti diklat, peserta tidak dapat menolak, dan tidak dapat meminta untuk diikutsertakan dilain waktu karena kondisi sedang hamil, menyusui, baru sembuh dari sakit, atau mempunyai riwayat penyakit kronis.

Apabila penyelenggara tidak memberikan perhatian dan kepedulian yang konsisten terhadap kondisi tersebut, tentu saja hal ini menimbulkan konflik tersendiri bagi peserta selama mengikuti pelatihan. Peserta yang sedang hamil harus duduk dalam jangka waktu yang lama pada saat mengikuti proses pembelajaran. Padahal seorang perempuan yang sedang hamil mengalami perubahan fisik dan kebiasaan antara lain (Rismalinda, (2015):

1. Sering berkemih karena ginjal harus menyaring volume darah yang lebih banyak 30-50 % dari biasanya serta membesarnya janin dan plasenta sehingga menekan

- kandung kemih.
2. meningkatnya detak jantung karena memompa lebih banyak darah ke Rahim dan ke seluruh tubuh.
 3. Pernafasan lebih pendek karena Rahim membesar sehingga ada tekanan pada rongga diafragma.
 4. Kram kaki dan nyeri punggung. Tentu saja dengan kondisi seperti ini, peserta yang sedang hamil memerlukan meja kursi yang nyaman untuk dapat meluruskan kaki, pinggang dan punggungnya sehingga dapat mengurangi atau mencegah kram kaki dan nyeri punggung.

Peserta yang sedang menyusui anak memiliki konflik tersendiri dengan tanggung jawab untuk memberikan ASI kepada anaknya disaat harus mengikuti pelatihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 83 tentang Ketenagakerjaan dan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap pekerja perempuan pada saat bekerja harus diberikan waktu untuk menyusui anaknya serta dijamin haknya dengan menetapkan kebijakan terkait pemberian waktu untuk menyusui tersebut serta didukung dengan menyediakan sarana prasana khusus di tempat kerja atau sarana umum lainnya.

Saat ini, Pemerintah sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat dengan kondisi ketidakmampuan karena keterbatasan fisik (disabilitas) untuk menjadi aparatur negara. Dengan keterbatasan fisiknya, peserta disabilitas memerlukan perhatian khusus dari penyelenggara agar dapat mengikuti pelatihan dengan rasa aman dan nyaman.

Demikian juga dengan peserta yang baru sembuh dari sakit atau memiliki riwayat penyakit kronis sangat membutuhkan dukungan semangat dari penyelenggara dengan memaklumi kondisi peserta, sehingga sewaktu-waktu apabila peserta membutuhkan waktu untuk beristirahat atau tidak dapat mengikuti kegiatan secara maksimal, peserta tidak khawatir penyelenggara tidak memberikan izin.

Bentuk- bentuk pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara secara khusus kepada peserta dengan kondisi tertentu tersebut merupakan sikap atau tindakan yang responsif terhadap gender/inklusi sosial. Responsif Gender adalah perhatian dan kepedulian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan yang struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Lembaga Administrasi Negara, 2015). Aspek-aspek yang dapat menjadi tolok ukur responsifnya suatu penyelenggaraan pelatihan tidaklah sebatas hanya pada kebijakan/aturan atau tersedianya sarana dan prasarana khusus bagi peserta dengan kondisi tertentu. Akan tetapi karena secara umum kebijakan/aturan tentang penyelenggaraan pelatihan yang responsif gender belum tersedia, maka penelitian ini membatasi masalah yang akan dideskripsikan dan dianalisa pada:

1. Bagaimana penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS di Provinsi Kalimantan Barat?
2. Apakah penyelenggara pelatihan sudah pernah mengikuti workshop/bimtek/pelatihan tentang GESI?
3. Apakah penyelenggara sudah menyediakan sarana prasarana bagi peserta dengan kondisi tertentu?

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka melalui penelitian ini akan diperoleh informasi tentang:

1. Penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS di Provinsi Kalimantan Barat .
2. Kuantitas keikutsertaan penyelenggara pelatihan dalam pelatihan/workshop/bimtek tentang GESI.
3. Ketersediaan sarana prasarana dalam penyelenggaraan pelatihan bagi peserta dengan kondisi tertentu.

Beberapa penelitian tentang gender anantara lain ditulis oleh Ulya (2013) yang membahas tentang Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender: Studi Kebijakan Pemerintah dan Aplikasinya dalam Pendidikan yang mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal kesetaraan gender serta memberikan rumusan konsep pendidikan berkesetaraan gender. Fibrianto (2016) dengan judul analisisnya Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016 menjelaskan bahwa dalam kepengurusan suatu kelompok masih banyak terjadi bahwa untuk jabatan tertentu harus diberikan pada satu gender tertentu seperti laki-laki lebih diprioritaskan untuk menjadi ketua sedangkan perempuan menjadi sekretaris atau bendahara. Lailatussaadah, dkk. (2020) menulis jurnal dengan judul Faktor-Faktor Penunjang Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Daring (Online) Ppg Dalam Jabatan (Daljab) Pada Guru Perempuan Di Aceh menyatakan bahwa ada dua faktor penunjang pelaksanaan PPG daljab pada guru perempuan di Aceh. Pertama, adanya dukungan dari sesama peserta yang selalu siap membantu keterbatasan antar peserta, dan kedua, dukungan dari anggota keluarga yang membantu mengoperasionalkan IT untuk daring. Sedangkan faktor penghambat adalah ketidakmampuan guru dalam mengoperasikan laptop, tidak adanya jaringan internet dan kurang fokus karena aktif mengajar, serta lemahnya motivasi guru dalam penggunaan IT karena menganggap IT tidak terlalu penting dalam PBM.

Meskipun beberapa penelitian tentang gender sudah ada, namun yang membahas tentang perspektif GESI dalam penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS masih sangat terbatas. Oleh karena itu penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran dan rekomendasi penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS yang responsif GESI.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS di Provinsi Kalimantan Barat dari perspektif GESI. Pendekatan deskripsi yang digunakan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara

mendalam tentang suatu kasus yang sedang diteliti (Jaya, 2020) dengan metode pengumpulan datanya menggunakan kuesioner (angket) melalui media *Google Form*. Kuesioner merupakan salah satu cara dalam mendapatkan informasi dari informan penelitian berupa pertanyaan atau pernyataan yang dijawab dengan cara memilih jawaban yang disediakan atau menulis sesuai dengan pendapat atau pengetahuan informan itu sendiri (Jaya, 2020). *Google Form* sebagai media dalam menyampaikan kuesioner digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan lebih mudah dan efektif karena peneliti tidak perlu mendatangi informan tetapi cukup mengirimkannya lewat media ini dan informan mengirim kembali respon/jawaban kepada peneliti (Fauzi, 2014). Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif (statistik deskriptif) untuk menggambarkan berbagai karakteristik data yang berasal dari suatu sampel melalui persentase atau rata-rata dalam bentuk analisis angka maupun gambar/diagram (Jaya, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS di Kalimantan Barat

Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS di Kalimantan Barat dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Kabupaten/Kota. Berikut tabel data penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019:

Tabel I. Data Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS di Kalimantan Barat Tahun 2019

No	Penyelenggara	Jumlah Angkataan	Metode pembagian peserta dalam kelas mempertimbangan keseimbangan jumlah laki-laki/perempuan	Karakteristik Peserta		
				Hamil	Menyusui Anak (di asrama/pulang)	sakit/baru sembuh
1	BPSDM Provinsi Kalbar	24	Ya	> 10	pulang	> 5
2	BKPSDM Kapuas Hulu	6	Ya	1-5	tinggal di asrama	1-5
3	BKPSDMAD Sambas	8	Ya	> 10	pulang	> 5
4	BKPSDM	2	Tidak	1-5	pulang	tidak melapor/tidak

	Bengkayang					ada
5	BKPSDM Landak	5	Tidak	5-10	tinggal di asrama	tidak ada
6	BKPSDM Sanggau	5	Ya	5-10	pulang	1-5
7	BKPSDM Sintang	5	Ya	1-5	tinggal di asrama	1-5
8	BKPSDM Ketapang	5	Tidak	5-10	pulang	1-5
9	BKPSDM Singkawang	3	Ya	1-5	pulang	1-5
	Rata-rata jawaban terbanyak		Ya (66,66%)	1-5 (44,44%)	pulang (66,66%)	1-5 (55,55%)

Dari rata-rata jawaban terbanyak di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. 66,66 % penyelenggara pelatihan membagi jumlah peserta dalam satu kelas dengan mempertimbangkan keseimbangan jumlah antara peserta laki-laki dan perempuan. Namun, ada juga beberapa penyelenggara yang tidak dapat membagi peserta laki-laki dan perempuan secara seimbang dikarenakan jumlah CPNS yang diterima didominasi oleh salah satu gender tertentu.
2. 44,44% jumlah peserta yang sedang hamil dalam penyelenggaraan pelatihan adalah berjumlah 1-5 orang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap penyelenggaraan pelatihan minimal ada 1 (satu) orang peserta yang sedang hamil.
3. 66,66% penyelenggara menyatakan bahwa peserta yang sedang menyusui anak diberi izin untuk tidak tinggal di asrama selama mengikuti pelatihan (pulang). Kondisi ini berpengaruh pada kebutuhan anak akan ASI yang tidak dapat terpenuhi pada jam-jam peserta sedang berada di dalam kelas.
4. 55,55% penyelenggara mencatat bahwa jumlah peserta yang sakit/baru sembuh dalam penyelenggaraan pelatihan adalah berkisar 1-5 orang peserta. Itu artinya, minimal ada 1 (satu) peserta yang sakit/baru sembuh dari sakit yang sedang mengikuti pelatihan.

Berdasarkan data di atas, peserta pelatihan dasar CPNS di Provinsi Kalimantan Barat memiliki beberapa karakteristik seperti sedang hamil, menyusui anak dan baru sembuh dari sakit/memiliki riwayat penyakit kronis. Dari perspektif GESI, hampir semua penyelenggara pelatihan sudah memberikan respon terhadap gender, hal ini dapat dilihat

dari metode pembagian jumlah peserta dalam satu kelas dengan mempertimbangkan keseimbangan jumlah peserta laki-laki dan perempuan. Selain itu, beberapa kebijakan sudah diberikan kepada peserta dengan kondisi tertentu. Peserta yang sedang menyusui tidak diwajibkan untuk menginap di asrama. Penyelenggara juga sudah menginformasikan kondisi peserta kepada tenaga pelatih/widyaiswara/narasumber karena peserta yang sedang hamil sering keluar/masuk kelas untuk berkemih dan peserta yang sedang menyusui harus “pumping”/menyusui anaknya. Pumping ASI adalah proses memerah ASI dari payudara dengan menggunakan pompa. ASI yang telah dipompa tersebut, kemudian diberikan kepada bayi melalui botol susu, atau disimpan di freezer untuk dikonsumsi lain waktu (mama’s choice, 2020).

Selain memberikan pelayanan/kebijakan yang khusus kepada peserta dengan kondisi tertentu, penyelenggara juga perlu menyediakan sarana prasarana yang diperlukan oleh peserta tersebut. Berikut ini data ketersediaan sarana prasarana bagi peserta dengan kondisi tertentu dalam penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS:

Tabel II. Data Sarana Prasarana Pelatihan

No	Penyelenggara	Sarana Prasarana			
		Meja/kursi peserta hamil	Ruang Laktasi	Ruang Laktasi lengkap	Toilet Prioritas
1	BPSDM Provinsi Kalbar	tidak ada	ada	tidak ada	ada
2	BKPSDM Kapuas Hulu	tidak ada	ada	tidak ada	tidak ada
3	BKPSDMAD Sambas	tidak ada	ada	tidak ada	tidak ada
4	BKPSDM Bengkayang	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
5	BKPSDM Landak	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
6	BKPSDM Sanggau	tidak ada	ada	tidak ada	tidak ada
7	BKPSDM Sintang	tidak ada	ada	tidak ada	tidak ada
8	BKPSDM Ketapang	tidak ada	ada	tidak ada	tidak ada
9	BKPSDM Singkawang	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
	Rata-rata jawaban terbanyak	Tidak ada (100%)	Ada (77,77%)	Tidak Ada (100%)	Tidak Ada (88,88%)

Tabel II di atas menggambarkan bahwa sarana prasarana seperti meja/kursi khusus untuk peserta yang sedang hamil, ruang laktasi yang lengkap serta toilet prioritas belum tersedia dalam penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Dari aspek sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS di Provinsi Kalimantan Barat belum responsif GESI terhadap peserta dengan kondisi tertentu.

Keterbatasan informasi tentang gender/GESI yang dimiliki oleh penyelenggara

merupakan salah satu permasalahan dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan dimana seringkali kebijakan/keputusan tersebut tidak netral gender/GESI, sehingga ada pengguna manfaat (kelompok sasaran) yang berbeda yang tidak mendapatkan manfaat dari kebijakan/keputusan tersebut. Untuk memperkecil kesenjangan tersebut diperlukan pengetahuan dalam menyusun rencana penyelenggaraan serta anggarannya yang responsif gender/GESI. Berikut ini data tentang informasi gender/GESI yang dimiliki oleh penyelenggara pelatihan:

Tabel III Informasi tentang Gender/GESI

No	Responden	Pernah mende- ngar tentang Gender	Pernah mende- ngar tentang GESI	sumber informasi tentang gender	Pernah mengikuti workshop/bi m -tek ttg Gender/GE SI	Pernah mendengar istilah PPRG
1	Kabid PKMF BPSDM Provinsi Kalbar	Ya	Ya	media cetak, media elektronik,dari teman	Tidak Pernah	Tidak Pernah
2	Kasubbid Pengembangan Kompetensi PIM dan Prajabatan BPSDM Provinsi Kalbar	Ya	Ya	dari teman	Tidak Pernah	Pernah
3	Kasubbid Diklat BKPSDM Kapuas Hulu	Tidak	Ya	media cetak, media elektronik, dari teman	Tidak Pernah	Tidak Pernah
4	Kasubbid Diklat BKPSDM Ketapang	Tidak	Ya	media elektronik	Tidak Pernah	Tidak Pernah
5	Kasubbid Diklat BKPSDMAD Sambas	Tidak	Ya	dari <i>questioner</i>	Tidak Pernah	Pernah
6	Kasubbag Aparatur BKPSDM Bengkayang	Ya	Ya	Media Elektronik	Tidak Pernah	Pernah
7	Kasubbid Diklat BKPSDM Singkawang	Ya	Ya	Media Elektronik	Tidak Pernah	Pernah

8	Kasubbid Jafung dan Pengembangan Karir BKPSDM Bengkayang	Tidak	Ya	Media Cetak, Media Elektronik	Tidak Pernah	Tidak Pernah
9	Kasubbid Pim dan Prajabatan BKPSDM Landak	Ya	Ya	Media Elektronik	Tidak Pernah	Tidak Pernah
10	Kabid Diklat BKPSDM Sintang	Tidak	Ya	Media Cetak, Media Elektronik, dari teman	Tidak Pernah	Tidak Pernah
11	Kasubbid Pim dan Prajabatan BKPSDM Sintang	Tidak	Ya	Media Cetak, Media Elektronik, dari teman	Tidak Pernah	Tidak Pernah
12	Kasubbag Perlengkapan BKPSDM Sintang	Tidak	Ya	Media Cetak, Media Elektronik, dari teman	Tidak Pernah	Tidak Pernah
13	Kasubbid Pengembangan Kompetensi BKPSDM Sanggau	Tidak	Ya	Media Cetak, Media Elektronik, dari teman	Tidak Pernah	Tidak Pernah
Rata-rata jawaban terbanyak		Tidak (61,53 %)	Ya (100%)	Media Cetak, Media Elektronik, dari teman (53,8%)	Tidak Pernah (100%)	Tidak Pernah (69,23%)

Terbatasnya informasi yang dimiliki oleh penyelenggara disebabkan karena penyelenggara belum pernah mengikuti pelatihan/workshop/bimtek tentang gender/GESI dan PPRG. Informasi tentang gender yang diperoleh dari media cetak, media elektronik atau dari teman belumlah cukup agar penyelenggara dapat merencanakan dan menganggarkan penyelenggaraan pelatihan yang responsif gender. Apa yang menjadi penyebab penyelenggara belum pernah mengikuti pelatihan tentang gender/GESI perlu untuk diteliti lebih lanjut. Apakah kesempatan yang tidak ada atau kurangnya penyelenggaraan pelatihan tentang gender/GESI itu sendiri. Hampir semua penyelenggara familiar dengan istilah gender. Sebaliknya karena istilah GESI masih baru maka belum semua orang mengetahui apa itu GESI. Untuk dapat menyelenggarakan pelatihan yang

responsif gender diperlukan pemahaman tentang 4 (empat) kompetensi gender, antara lain (Kemeterian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Lembaga Administrasi Negara, 2015):

1. Sadar Gender dengan memberikan ciri tentang pemahaman terhadap gender.
2. Peka Gender, memberikan kemampuan untuk membedakan, memilah dan menilai peran gender, dengan cara pandang, mengukur dan mengoreksi keadilan di lingkungan dengan perspektif kesetaraan gender
3. Mawas Gender, memberikan kemampuan untuk menggali dan menemukan penyebab masalah gender dengan cara menganalisa dan menggunakan metodologi analisis gender
4. Peduli Gender, memberikan kemampuan untuk berpikir tentang alternatif-alternatif solusi dari kasus-kasus ketidakadilan gender, dimana peserta diharapkan dapat menyelesaikan kasus yang ada melalui kebijakan atau pengambilan keputusan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN

Konsep pengarusutamaan gender bertujuan agar setiap orang baik laki-laki maupun perempuan memperoleh kesempatan/peluang, partisipasi, pengawasan dan manfaat yang sama terhadap pembangunan. Demikian halnya dalam pelatihan dasar CPNS, peserta dengan kondisi tertentu seperti sedang hamil, sedang menyusui, dan sakit/memiliki riwayat penyakit kronis memiliki hak yang sama dengan peserta lain untuk mengikuti pelatihan dengan rasa aman dan nyaman.

Peserta dengan kondisi tersebut membutuhkan perhatian berupa kebijakan atau sarana prasarana yang mendukung kondisi peserta. Karena belum tersedianya standar atau aturan tentang penyelenggaraan Pelatihan Dasar yang responsif gender/GESI maka penyelenggara dapat mengatasinya dengan membuat kebijakan/aturan khusus bagi peserta tersebut dan menyediakan sarana prasarana yang sesuai dan dibutuhkan oleh peserta. Agar penyelenggara dapat menyusun perencanaan serta mengganggarkan pelatihan yang responsif GESI, maka penyelenggara perlu untuk menambah pengetahuan dan keterampilan tentang GESI dengan mengikuti pelatihan/workshop/bimtek tentang GESI.

SARAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CPNS DI KALIMANTAN BARAT

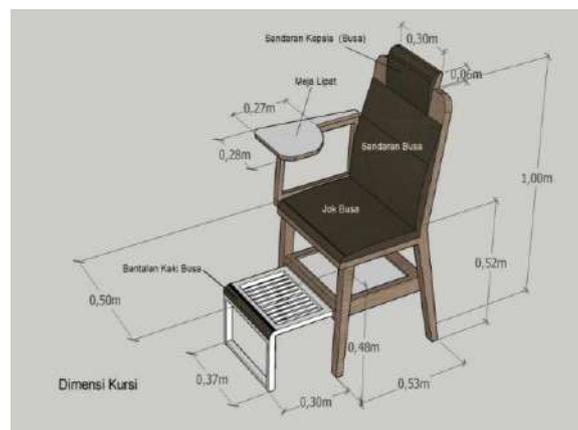
Karena belum tersedianya standar/aturan tentang penyelenggaraan pelatihan yang responsif gender maka berikut ini beberapa saran untuk penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS yang responsif GESI:

- 1) Tempat duduk bagi peserta yang sedang hamil

Berdasarkan perubahan fisik yang terjadi pada ibu hamil, maka saran tempat

duduk (seperti gambar 1) yang dapat disediakan adalah dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Jarak antara tempat menulis atau meletakkan buku/laptop dengan sandaran kursi cukup jauh sehingga tetap aman ketika hendak duduk atau berdiri
- b. Sandaran kursi diberi bantalan agar nyaman ketika harus meluruskan badan
- c. Di bawah tempat duduk disediakan papan yang dapat ditarik ke luar atau didorong ke dalam untuk meluruskan kaki

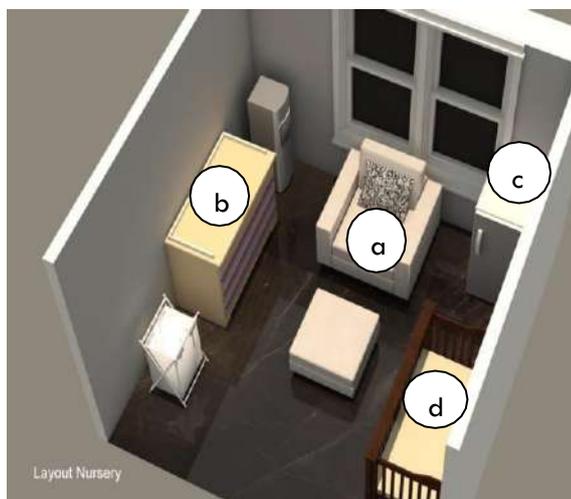


Gambar 1 Saran Tempat Duduk untuk Peserta yang sedang Hamil Sumber: Penulis

2) Ruang Laktasi

Bagi peserta yang sedang menyusui anak yang tidak tinggal di asrama (pulang) perlu untuk memberikan ASI kepada anaknya pada jam-jam tertentu padahal peserta sedang belajar di dalam kelas. Untuk mengatasi ini, peserta dapat diberikan kesempatan untuk “*pumping*” sehingga anaknya dapat mengkonsumsi ASI setiap waktu walaupun ibunya tidak bersamanya. Dengan tersedianya ruang laktasi yang lengkap dengan lemari pendingin maka ASI hasil “*pumping*” dapat disimpan dan kualitas ASI juga tetap terjaga. Beberapa saran sarana prasarana yang perlu disediakan di dalam ruang laktasi (seperti gambar 2) antara lain:

- a. Kursi untuk duduk saat sedang menyusui
- b. tempat untuk meletakkan bayi apabila hendak mengganti pakaian/popok
- c. Lemari es untuk menyimpan ASI “*pumping*”
- d. Tempat tidur bayi



Gambar 2 Ruang Laktasi Sumber: Penulis

3) Toilet Prioritas

Toilet prioritas diperlukan untuk:

- a. memberikan prioritas kepada peserta dengan kondisi tertentu agar tidak antri dalam menggunakan sarana tersebut;
- b. memberikan rasa aman karena toilet dilengkapi dengan “*disabled handlerails*”

(seperti gambar 3)



Gambar 3 Toilet Prioritas keterangan anak panah : *disabled handlerails* Sumber : Delta-Sky- Club- San Diego, jpg

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku:

- Jaya, I Made Laut Mertha. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*, Yogyakarta, Quadrant.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (2016). *Panduan Praktis Memahami dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Daerah*, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Jakarta
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Lembaga Administrasi Negara, (2015) *Bahan Ajar Kasus Berbasis Kesetaraan Gender Pada Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara*, Deputi Bidang PUG Bidang Palsoskum, Jakarta
- Rismalinda. (2015) *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Kehamilan*, Jakarta, Penerbit: Trans Info Media.

Sumber dari Jurnal:

- Fibrianto, Alan Sigit. (2016). Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016, *Jurnal Analisa Sosiologi* 5(1): 10-27. Diakses dari [file:///C:/Users/User/Downloads/18422-39328-1-PB%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/18422-39328-1-PB%20(2).pdf) pada hari Jumat, 13 November 2020 pukul 15.23 WIB
- Ulya, Inayatul. (2013). Pendidikan Berbasis Gender: Studi Kebijakan Pemerintah dan Aplikasinya dalam Pendidikan. *Jurnal Wahana Akademika*. Vol.15 No.2, 147-170. Diakses dari <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/view/536/484> pada hari Kamis, 24 September 2020 pukul 18.20 WIB.
- Lailatussaadah, Fitriyawany, Erfiati, Sri Mutia. (2020), FAKTOR-FAKTOR PENUNJANG DAN PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DARING (ONLINE) PPG DALAM JABATAN (DALJAB) PADA GURU PEREMPUAN DIACEH, Diakses dari <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/7735>, pada hari Jumat, 13 November 2020 pukul 14.25 WIB
- Fauzi, Muhammad Rizal. 2014 PENGGUNAAN GOOGLE FORM SEBAGAI ALAT EVALUASI PEMBELAJARAN PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu. Diakses dari http://repository.upi.edu/6796/68/S_KTP_0900416_Chapter3.pdf ... pada hari Kamis, 12 November 2020 pukul 11:51 WIB.

Sumber dari internet:

- Mama's Choice, Pumping ASI? Kenali Risiko dan Manfaatnya. Diakses dari <https://mamaschoice.id/article/pumping-asi> ... pada hari Kamis, 12 November 2020 pukul 16:21 WIB.
- Susanti, Emy. (2020) IMPLEMENTASI ISU GESI (GENDER EQUALITY &

SOCIAL INCLUSION) DALAM PENELITIAN DRPM RISTEKDIKTI.
(PSG_LPI Universitas Airlangga-SWGI). Diakses dari
http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/unduh_berkas/Implementasi%20Isu%20Gesit.pdf
pada hari Jumat, 13 November 2020 pukul 13.28 WIB

Delta-Sky-Club-San-Diego.jpg. Gambar Toilet Prioritas, Diakses dari
https://www.electronicbeats.net/app/uploads/2017/05/delta_sky_club_san_diego_15.jp_g...pada
hari Selasa, 01 September 2020 pukul 10.05 WIB

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS